



Sejarah Gerakan Politik Pemuda Di Jakarta Sekitar Proklamasi

Satriono Priyo Utomo

Overseas Research Assistant, National University of Singapore

Email: satriono23@gmail.com

Abstract

The history of the Indonesian youth political movement in 1928 not only inherited national politics with the ties of "imagine of Indonesia" as a homeland, nation and language, namely Indonesia. But it also gave birth to the view that youth is the core of change. This view became the belief of Indonesian youth in the 1940s to be involved in the revolutionary wave of "imagine of Indonesia" in a more critical and progressive manner in political actions. This paper aims to explain youth activism in Jakarta around a more advanced proclamation, accelerating from national politics to populist politics. There were two strongest youth node organizations in Jakarta at that time, Asrama Menteng Raya 31 and Prapatan 10. Both of them brought together young people from different ethnic and national backgrounds. But the youth political movement in the 1940s had a more populist political tone with its political activities carrying out political education work in order to mobilize people's awareness of the struggle for independence. Then the youth in Jakarta formed an organizational node called the Angkatan Pemuda Indonesia (API), which contributed to the historical events of the grand meeting at Ikada Square on September 19, 1945.

Keywords: Youth, Indonesia, History, Movement, Politics.

Abstrak

Sejarah gerakan politik pemuda Indonesia di tahun 1928 tidak hanya mewarisi politik kebangsaan dengan ikatan "membayangkan Indonesia" sebagai sikap bertanah air, berbangsa dan berbahasa satu yaitu, Indonesia. Tetapi juga melahirkan pandangan bahwa pemuda adalah inti perubahan. Pandangan inilah yang kemudian menjadi keyakinan pemuda Indonesia di tahun 1940-an terlibat dalam gelombang revolusi "membayangkan Indonesia" dengan lebih kritis dan progresif dalam aksi-aksi politik. Tulisan ini bertujuan menjelaskan aktivisme pemuda di Jakarta sekitar proklamasi yang lebih maju, melakukan akselerasi dari politik kebangsaan menjadi politik kerakyatan. Ada dua organisasi simpul pemuda di Jakarta terkuat pada masa itu, Asrama Menteng Raya 31 dan Prapatan 10. Keduanya sama-sama menghimpun anak-anak muda dengan latar belakang suku dan bangsa yang berbeda. Tetapi gerakan politik pemuda di tahun 1940-an lebih bernada politik kerakyatan dengan aktivitas politiknya melakukan kerja-kerja pendidikan politik guna memobilisasi kesadaran rakyat terhadap perjuangan kemerdekaan. Kemudian para pemuda di Jakarta membentuk simpul organisasi bernama Angkatan Pemuda Indonesia (API), yang turut melahirkan peristiwa sejarah rapat akbar di Lapangan Ikada pada 19 September 1945.

Kata kunci: Pemuda, Indonesia, Sejarah, Gerakan, Politik.



PENDAHULUAN

Menurut Soewarsono, sejarah Indonesia modern sering dipahami sebagai sebuah proses “perjuangan” panjang dari sebuah “keluarga”. Sebagai sebuah proses “perjuangan” panjang, sejarah modern Indonesia biasanya dianalogikan sebagai sebuah garis atau jalan—yang sudah barang tentu, tidak harus dibayangkan lurus—dan pembentukannya dimungkinkan oleh keberadaan sejumlah “titik” atau “tonggak-tonggak” yang merupakan penanda penting dari garis atau jalan adalah “angkatan-angkatan” (Muridan, 1999: 1). Sebagaimana sejarah gerakan politik pemuda Indonesia di tahun 1928 tidak hanya mewarisi politik kebangsaan dengan ikatan “membayangkan Indonesia” sebagai sikap bertanah air, berbangsa dan berbahasa satu yaitu, Indonesia. Tetapi juga melahirkan pandangan bahwa pemuda adalah inti perubahan. Pandangan inilah yang kemudian menjadi keyakinan pemuda Indonesia di tahun 1940-an terlibat dalam gelombang revolusi “membayangkan Indonesia” dengan lebih kritis dan progresif dalam aksi-aksi politik.

Mengapa “pemuda” begitu bermakna dalam perjuangan suatu bangsa dan negara? Karena pemuda bukan sekadar kategori demografi, tapi suatu fenomena historis, dan masalah kepemudaan di atas ini justru muncul sebagai suatu fenomena yang universal. Maka masalahnya jauh lebih kompleks. Maka perbuatan pemuda tidak hanya terbawa oleh keharusan yang mengitari dirinya. Perbuatannya adalah hasil pilihan yang sadar, setelah ia berdialog dengan lingkungan sosial dan zamannya. Perbuatannya bertolak dari hasil interpretasi terhadap lingkungan sosial—historis yang mengitari dan hasrat normatif (atau, bahkan kecenderungan filosofis) yang telah dianutnya. Jadi sebagai aktor sejarah, pemuda tidaklah sekadar terbawa oleh keharusan struktural, tapi ia membuat “pilihan” dari kemungkinan-kemungkinan



yang terdapat dalam struktur itu (Ahmaddani G-Martha dan Tim, 1985: 31).

Dua tonggak sejarah yaitu 1908 dan 1928, pengingkaran secara konseptual terhadap jurang sosial dan kultural—antara elite dan massa dan antara kelompok-kelompok etnis—menciptakan realitasnya sendiri. Dari sudut politik, pengingkaran tersebut berarti menjadikan Hindia-Belanda sebagai sistem yang tidak sah, sehingga sistem tandingan harus mulai dibina. Secara praktis hal ini antara lain berarti adanya usaha memperlebar jaringan pendidikan swasta, sistem komunikasi massa dan sebagainya. Maka, ketika zaman yang lebih keras datang dengan meletusnya perang dan datangnya pendudukan Jepang, realitas baru yang sedang tercipta inilah yang lebih berbicara. Pendudukan Jepang yang pendek dan teramat keras serta mencekam ini sekaligus meniadakan—meskipun, mungkin untuk sementara—segala kemewahan konseptualisasi tentang sesuatu yang berada di luar pengalaman langsung. Kini, yang dikonsepsikan itu telah jadi bagian dari pengalaman diri langsung. “Penderitaan”, “kemiskinan”, atau apa saja, bukan lagi sekadar hasil dari perenungan kecendekiaan, tetapi adalah pantulan dari pengalaman yang langsung (Ahmaddani G-Martha dan Tim, 1985: 38).

Kesadaran gerakan politik pemuda 1945 menurut Ben Anderson muncul karena mereka bisa bergerak dan berevolusi. Sedangkan Sumpah Pemuda diciptakan oleh pemuda-pemuda yang justru karena tidak bisa berbuat apa-apa, lalu bersumpah. Militansi pemuda pada masa ini terbentuk karena penderitaan rakyat yang luar biasa pada zaman Jepang, orang mati di pinggir jalan karena kelaparan, wabah penyakit, juga akibat dari inflasi yang luar biasa. Itu menimbulkan suatu suasana yang penuh kegelisahan. Ditambah dengan suasana perang dan kebencian anak muda kepada kolaborator-kolaborator



dengan Jepang, yang dianggap sangat kejam, dengan sistem romushanya, eksekusi-eksekusi yang dijalankan di tempat umum, dengan penganiayaan oleh Kempetai dan sebagainya (Baskara T. Wardaya, 1999: 8).

Sejarah gerakan politik pemuda sebagai “pencari yang gelisah” memiliki basis realitas yang unik di tiap masanya. Jika “Sumpah Pemuda” bisa dimengerti sebagai sebuah politik kebangsaan oleh pemuda dalam “membayangkan Indonesia”. Lantas dari sudut apakah kita harus mengerti “Proklamasi”? Oleh karena itu, tulisan ini berusaha menjelaskan sejarah gerakan politik pemuda Jakarta di sekitar Proklamasi, dan mencoba memberikan pengertian atas dinamika pemuda dalam merespons realitas sosial politik yang terjadi pada waktu itu. Dengan melanjutkan apa yang sudah diriset oleh Ben Anderson melalui “Revoloesi Pemuda”, tulisan ini dibantu oleh memoar yang ditulis aktivis-aktivis pemuda 1945 seperti Soemarsono, Sidik Kertapati, A.M. Hanafi, Alizhar Thaib dan sebagainya dalam menjelaskan aktivisme politik yang dilakukan oleh pemuda 1945.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan studi pustaka. Tahapan yang dipakai dalam penelitian ini tertuju pada kaidah-kaidah penelitian sejarah yang mempunyai lima tahap, yaitu: pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi dan penulisan atau historiografi. Objek dalam penelitian sejarah ini adalah kegiatan politik aktivis pemuda dengan locus Jakarta. Periodesasi yang dijelaskan dalam tulisan ini masa-masa sekitar proklamasi tahun 1945. Tulisan ini diperkuat dengan kesaksian aktivis pemuda pada tahun tersebut yang termuat dalam bentuk memoar seperti Sidik Kertapati, Alizhar Thaib dan sebagainya.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **Simpul-Simpul Pemuda di Jakarta dan Percepatan Proklamasi**

Pada tahun 1940, secara agak meyakinkan telah diperkirakan ada sekitar sedikit di bawah lima juta pemuda di Pulau Jawa berumur antara 15 dan 19 tahun. Pada tahun yang sama, di seluruh Indonesia ada 1.789 pelajar yang terdaftar di sekolah-sekolah menengah atas yang mendapat pendidikan Barat, dan 637 mahasiswa yang memasuki lembaga-lembaga pendidikan tingkat tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dari anggota-anggota priyayi terkemuka, atau dari golongan kecil orang-orang profesional yang berhasil di kota-kota terbesar, atau dari keluarga-keluarga pedagang kaya dari pulau luar Jawa. Banyak di antara mereka juga mempunyai hubungan yang erat dengan golongan politisi terkemuka dari pergerakan nasionalis sebelum perang. Mereka adalah suatu golongan yang berasal dari pergaulan terpilih itu, yang menggunakan bahasa Belanda di rumah dan percakapan sehari-hari, dan sangat sadar akan status mereka yang tinggi dalam masyarakat pribumi. Selama bertahun-tahun terakhir zaman Belanda, politik pemuda terbatas terutama pada golongan ini. Pimpinannya sangat terpusat di kota besar, Jakarta dan Bandung, karena di tempat itu terdapat fakultas kedokteran, hukum, dan teknik (Ben Anderson, 1988: 37).

Kemungkinan bekas-bekas jejak pendudukan Jepang meninggalkan luka yang mendalam kepada kaum muda, terutama yang berusia 15-21 tahun. Khususnya pemuda-pemuda yang sempat memperoleh pendidikan rendah—kalangan itulah yang merupakan mayoritas—propaganda Jepang yang berkepanjangan dan begitu intens sangat membekas dalam diri mereka. Propaganda Jepang mempersempit sekaligus mengintensifkan sentimen nasionalisme para pemuda. Sedikit dari mereka yang menumbuhkan orientasi pro-



Jepang, tetapi banyak dari mereka yang menumbuhkan nasionalisme yang sangat militan, bercampur dengan perasaan bias anti-Barat yang kuat dan bersifat emosional yang justru diwujudkan dalam bentuk kebencian—bahkan kerap meluas menjadi antipati—terhadap orang Indo-Eropa dan Tionghoa (Kahin, 2013: 185). Selain itu, menurut Soemarsono (2008: 5), “sejak menggantikan Belanda ternyata penjajahan Jepang lebih kejam. Kami berpendapat, kalau mereka tidak dilawan, korban akan semakin banyak. Romusa sudah jutaan yang menjadi korban. Kita sudah kehilangan saudara-saudara kita yang menjadi romusa, mati karena dikenakan kerja paksa membantu perang Jepang.”

Gaya pemerintahan Jepang juga menyumbang timbulnya perasaan krisis di dalam jiwa pemuda. Peran pemuda menjelang akhir perang menjadi semakin banyak memberi kesempatan kepada mereka, sedangkan mobilisasi politik dalam organisasi-organisasi Jepang semakin bertambah jumlahnya. Baru setelah kekalahan Jepang mulai benar-benar tampak, perlawanan pemuda terhadap pihak penguasa mengambil bentuk suatu susunan yang tidak padat—yang di dalamnya dilontarkan kritik terhadap tindakan-tindakan pendudukan Jepang. Hanya di Jakarta dan Bandung kelompok-kelompok oposisi ini lebih luas artinya daripada sifat lokal saja (Poeze, 1999: 322).

Gerakan politik yang dilakukan pemuda Jakarta dinyatakan dengan cara lebih berhati-hati, dalam kelompok-kelompok tidak resmi dan di bawah tanah. Semula, organisasi bawah tanah anti-Jepang yang paling besar adalah yang diketuai Amir Syarifuddin. Agaknya organisasi tersebut dibentuk beberapa minggu sebelum Jepang mendarat di Indonesia di bawah perlindungan pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda memberi bantuan sebesar



25.000 gulden yang diserahkan Dr. Charles van der Plas kepada Amir. Organisasi tersebut menarik anggota dari berbagai orang yang sangat anti-fasis, mayoritas berasal dari anggota partai komunis bawah tanah (Kahin, 2013: 159).

Simpul gerakan politik pemuda Jakarta melalui asrama sebagai ruang pengorganisasian. Asrama memberi tempat pengungsian dari keluarga-keluarga dan tempat tidur untuk para mahasiswa yang kandas di Ibu Kota. Asrama juga menyediakan forum diskusi secara tertutup, dan suatu fokus untuk solidaritas. Ada tiga asrama yang terkuat menjadi pusat pengorganisasian pemuda dengan karakteristiknya masing-masing.

Pertama, berpusat di asrama fakultas kedokteran, terletak di Jalan Prapatan 10 dengan karakteristik mahasiswa tingkat tinggi golongan atas dari masyarakat pribumi. Orientasi mereka lebih condong ke Barat daripada gerakan-gerakan bawah tanah lainnya, dan bahwa banyak di antara mereka berada di bawah pengaruh sosial-demokratisnya Sjahrir. Kedua, gerakan bawah tanah yang berpusat di Asrama Angkatan Baru Indonesia di Jalan Menteng Raya 31. Di asrama ini diberikan diskusi mengenai nasionalisme yang kuat dengan guru-guru yang memberikan ceramah seperti: Sukarno, Hatta, Yamin, Sunario dan Amir Syarifuddin. Anggota asrama Menteng Raya 31 adalah bekas mahasiswa fakultas hukum, dan juga tergabung pemuda-pemuda yang mempunyai tingkat pendidikan lebih rendah tetapi sudah turut dalam gerakan-gerakan pemuda tahun 1930-an. Komposisi anggotanya berasal dari golongan atas sebelum perang seperti: Chaerul Saleh, Sukarni, A.M. Hanafi dan Ismail Widjaja sedangkan golongan relatif rendah seperti pemuda Aidit, Lukman dan Sjamsuddin Tjan. Ketiga, Asrama Indonesia Merdeka yang didirikan di Kebon Sirih 80 oleh Laksamana Maeda (Ben Anderson, 1988: 64-65).



Laksamana Maeda berperan penting dalam melakukan pendidikan politik terhadap pemuda Jakarta. Setelah pendirian Asrama Indonesia Merdeka, Laksamana Maeda menghubungi banyak pemimpin nasionalis terkemuka dan meminta mereka agar memberikan kuliah kepada para mahasiswa tentang nasionalisme, ekonomi, politik, sosiologi dan Marxisme. Maeda mengatakan kepada mereka bahwa kuliah tersebut bertujuan untuk melatih mahasiswa menjadi pemimpin nasionalis yang cakap dan sepenuhnya menyadari bahwa kemerdekaan Indonesia yang kelak mereka pimpin haruslah memiliki unsur sosial yang bermakna bagi kehidupan di desa maupun kota. Selain Wikana dan Subardjo, tokoh-tokoh nasionalis Indonesia yang mengajar di Asrama Indonesia Merdeka adalah Hatta, Sjahrir, Soediro dan Iwa Kusumasumantri. Selain itu, juga diberikan pembelajaran komunisme, yang mereka ajarkan bersifat sangat internasional. Hingga akhir Juli 1945, sekolah-sekolah Asrama Indonesia Merdeka mengadakan kursus dwi-bulanan dan menghasilkan beberapa ratus orang tamatan (Kahin, 2013: 165).

Grup Menteng 31 mendorong terbentuknya Barisan Banteng—merupakan organisasi pemuda semi-militer. Mereka dilatih baris-berbaris serta bermain dengan senjata kayu. Intinya semacam latihan guna menanamkan militansi dalam diri para pemuda. Di antara aktivis yang mengorganisasikan Barisan Banteng adalah Aidit. Dari grup yang sama lahir Barisan Pelopor. Inti Barisan Pelopor ini kemudian menjadi Barisan Pelopor Istimewa dan hanya beranggotakan beberapa puluh orang. Fungsinya sebagai pengawal pribadi Sukarno. Anggota Barisan Pelopor Istimewa antara lain, Aidit, Sakirman, Lukman dan Sidik Kertapati—kemudian menjadi tokoh-tokoh yang memegang peran dalam fase sejarah berikutnya. Grup Menteng 31 juga mencoba mengorganisir tukang-tukang becak dan



mendirikan Persatuan Buruh Kendaraan. Di antara aktivisnya adalah Aidit dan kawan-kawannya. Baik Barisan Banteng maupun Persatuan Buruh Kendaraan akhirnya dibubarkan Jepang karena dianggap berbahaya (Gie, 2005: 51).

Ketika Putera dibubarkan Jepang dan Jawa Hokokai dibentuk pada tahun 1944, aktivis-aktivis pemuda dari grup Menteng 31 mengadakan pertemuan-pertemuan guna membicarakan persoalan politik. Pertemuan itu menarik kesimpulan bahwa Jepang akan bertindak lebih represif. Oleh karena itu, para pemuda harus terus melakukan konsolidasi kekuatan untuk memperkuat gerakan ilegal anti-fasis yang sudah ada. Aidit, Lukman dan beberapa pemuda non-komunis mendirikan organisasi anti-fasis, Gerakan Indonesia Merdeka atau Gerindom (Bintang Merah, 9, 1953: 479). Dewan politik Gerindom dipegang oleh Aidit, Lukman dan Suko. Pedoman kerja Gerindom adalah *cellenbow* dan *machtsvorming*—usahanya diletakkan pada menghimpun para pemuda revolusioner anti-fasis dan menghubungkannya dengan perjuangan massa kaum tani, buruh dan angkatan bersenjata. Hubungan antara para pemuda dan angkatan revolusioner yang lebih tua dilakukan melalui M. Jusuf, Samudro, Bahri, Kamal, Djalil dan lain-lain. Aidit juga mempunyai hubungan langsung dengan Wikana, Chairul Saleh dan tokoh-tokoh gerakan pemuda lainnya. Rumah di Jalan Defensielijin van den Bosch (Himpunan Kebaktian Rakjat) yang diberi nama “Asrama Kemerdekaan” menjadi perpustakaan bagi pemuda-pemuda yang mempunyai hubungan dengan Gerindom. Mereka dipinjamkan buku-buku revolusioner yang sulit didapat pada masa pendudukan Jepang, guna mempelajari teori-teori tentang revolusi dan mempraktikannya (Sidik Kertapati, 1961: 44).



Pada awal tahun 1945 ketika kempetai semakin represif kepada para aktivis pergerakan, guna menghindari penangkapan para pemuda dipaksa menyingkir keluar kota dan melakukan pekerjaan revolusioner di kalangan rakyat. Aidit pun terpaksa menyingkir dengan menggunakan surat keterangan palsu dari seidenbu yang diperoleh melalui Chaerul Saleh. Kemudian menjelajahi pulau Jawa dan mempopulerkan cita-cita kemerdekaan di kalangan pemuda dengan menggunakan semboyan organisasi Angkatan Muda, “Kemerdekaan Indonesia sekarang juga dan berbentuk Republik kesatuan!” Dengan demikian kegiatan Gerindom terhubung bersama kegiatan anti-fasis di seluruh Jawa. Gerindom melakukan mobilisasi kesadaran tentang kemerdekaan melalui cetakan poster, “Indonesia Merdeka”, yang pertama dan dilukis oleh Affandi dengan menggambarkan pemuda Indonesia sedang mematahkan rantai-rantai penjajah. Pendistribusian poster dan pamflet dikirim ke seluruh Jawa melalui Legiman Harjono, aktivis muda dikalangan buruh kereta api (Sidik Kertapati, 1961: 45).

Sementara itu pada 14 Agustus 1945 telah beredar desas-desus dari radio Tokyo tentang kekalahan Jepang dalam perang kepada sekutu. Sidik Kertapati (1961: 75) mengatakan, menghadapi situasi yang menentukan itu Aidit dengan beberapa pimpinan pemuda dari simpul-simpul revolusioner lainnya menggalang kesatuan aksi. Kabar penyerahan Jepang segera diteruskan ke semua pelosok kota, ke pos-pos grup di Pasar Senen, Tanah Abang, Pulauputer, Klender sampai ke Bekasi, Pasar Minggu, Tangerang dengan tujuan supaya rakyat, terutama kaum tani di pinggiran kota siap sedia menghadapi segala kemungkinan. Pada 15 dan 16 Agustus tercatat sebagai aktivitas dan kesibukan revolusioner yang menentukan jalannya sejarah. Pada 15 Agustus sore, Aidit menemui teman-temannya di asrama Baperki di



Cikini 71. Aidit juga menghubungi Wikana di Kebon Sirih dengan maksud supaya bersiap menghadapi pertemuan para tokoh pemuda dan pelajar dari macam-macam golongan dan grup yang akan diadakan secara rahasia di ruang belakang kebun jarak Institut Bakteriologi Pegangsaan.

Pertemuan tersebut menghasilkan buah pemikiran revolusioner para pemuda bahwa kemerdekaan Indonesia yang menjadi hak dan soal rakyat Indonesia harus segera dinyatakan dengan jalan proklamasi. Untuk menyampaikan kesimpulan rapat kepada Sukarno, pertemuan mengutus Wikana, Aidit, Subadio dan Suroto Kunto. Pada kira-kira jam 21.00 mereka tiba di beranda muka Pegangsaan Timur 56 dan mulailah pembicaraan antara Sukarno dan para utusan pemuda dengan Wikana sebagai juru bicara. Para utusan itu mendesak agar proklamasi kemerdekaan diumumkan keesokan harinya, 16 Agustus di pagi hari (Sidik Kertapati, 1961: 76).

Dapat dikatakan bahwa sebagian besar warga Indonesia pada awalnya kebingungan oleh kabar menyerahnya Jepang, dan sulit mengetahui apakah suara-suara kemerdekaan yang datang dari Jakarta adalah upaya drama terakhir dari Jepang atau sebuah kabar yang benar-benar baru. Hanya dua kelompok yang sudah siap untuk momen ini—kelompok sayap kiri lama yang sudah sejak awal anti-Jepang, dan generasi muda yang di mobilisasi oleh Jepang namun tidak bisa mereka kendalikan. Gerakan pemuda revolusioner muncul dengan cepat di kota-kota dimana kedua elemen tersebut dapat saling bertemu. Mereka mulai menempelkan lambang-lambang merah putih dan poster-poster revolusioner, dan mulai menggertak tentara pengawal Jepang dengan menggantikan bendera Jepang dengan bendera Republik di gedung-gedung publik (Reid, 2018: 35).



Setelah proklamasi dibacakan, malam harinya para pemuda mendorong proklamasi disiarkan melalui radio setelah pada siang harinya mereka gagal melakukan hal tersebut. Dalam malam yang telah larut para pemuda bergerak menggambar dan menulisi tembok-tembok di jalan-jalan raya dengan segala macam slogan-slogan revolusi, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Dengan bantuan lampu tempel atau lampu sepeda digambarlah karikatur yang menelanjangi kekejaman kaum fasis dan kaum penjajah, tapi ditulis juga kata-kata emas yang menjadi slogan perjuangan kemerdekaan di sejarah dunia. Tembok gedung-gedung, trem, gerbong-gerbong kereta api yang mau berangkat ke Surabaya dan Bandung, semuanya dihiasi dengan kata-kata yang mencerminkan semangat revolusi, “Merdeka atau Mati”, “Sekali Merdeka Tetap Merdeka”, “Indonesia, Never Again the Lifeblood of Any Nation” (Sidik Kertapati, 1961: 99).

Pemuda dan 19 September 1945

Sesudah proklamasi kemerdekaan dibacakan, pada 1 September 1945 di Asrama Menteng 31 para pemuda melakukan konsolidasi dengan membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API) yang diketuai oleh Wikana dengan pimpinan lainnya yaitu Chaerul Saleh, Aidit, Darwis, A. M. Hanafi, Kusnandar, Djohar Nur dan Chalid Rasjidi. Kepemimpinan API Jakarta diketuai oleh Aidit dan wakilnya Alizhar Thaib. Organisasi ini bertujuan melucuti senjata dan mengambil-alih semua infrastruktur tentara Jepang. Hal ini dimaksudkan untuk mengkoordinasi dan menyatukan organisasi pemuda bawah tanah. Di bawah pengaruh API, dua organisasi lain yaitu Barisan Rakyat Indonesia (pusat mobilisasi petani) dan Barisan Buruh segera dibentuk tidak lama sesudahnya—Lukman lalu aktif memimpin



organisasi Barisan Rakyat, sedangkan Njono aktif memimpin organisasi Barisan Buruh Indonesia. Kemudian API memobilisasi rakyat untuk melakukan pengambil-alihan rel serta kereta dan stasiunnya, instalasi-instalasi penyiaran yang dilakukan guna menyebarluaskan berita proklamasi dan memberikan pendidikan politik kepada rakyat (Sidik Kertapati, 1961: 111).

Pada 19 September 1945, API berusaha memobilisasi massa untuk mengadakan demonstrasi di Lapangan Ikada untuk menunjukkan bahwa proklamasi didukung penuh oleh rakyat, dan menekan pemimpin Republik untuk bersikap lebih tegas atas kemerdekaan Indonesia. Para pemuda mendorong agar Sukarno dan Hatta hadir di Lapangan Ikada, bersama surat yang dikirimkan ke Sukarno, para pemuda dan pelajar menjamin keselamatannya. Sejak pagi massa sudah berdatangan, menjelang dimulainya rapat pada sore hari Jepang mengerahkan tentara dan persenjataannya di jalanan Lapangan Ikada. Rakyat menunggu untuk mendengarkan pidato Sukarno sebagai Presiden untuk pertama kalinya. Sambil menanti kedatangan Sukarno, sekaligus meredam kegelisahan dan membangkitkan semangat rakyat, Aidit naik ke atas mimbar mengajak rakyat untuk menyanyikan lagu "Indonesia Raya" dan "Darah Rakyat". Akhirnya Sukarno dan Hatta muncul yang disambut dengan pekik, "Merdeka", "Hidup Bung Karno", "Hidup Bung Hatta". Selepas Sukarno berpidato, massa bubar dengan tertib, sambil meninggalkan Lapangan Ikada, mereka menyanyikan lagu-lagu perjuangan ciptaan Cornel Simanjuntak, "Dari Barat Sampai ke Timur", "Darah Rakyat", dan lainnya (Alizhar Thaib, 1993: 91).

Terdapat suatu dorongan intuisi yang kuat pada pemuda bahwa mereka merupakan pembebas penderitaan rakyat. Dalam suasana psikologis ini kita dapat memahami mengapa lagu Darah Rakyat



begitu cepat tersebar setelah dinyanyikan pada September 1945 di Lapangan Ikada. Seolah-olah ada identifikasi diri antara lagu tersebut dan cita-cita mereka. Pemuda-pemuda revolusi seolah-olah "bersumpah kepada rakyat" bahwa mereka akan menghilangkan kemiskinan dengan kemerdekaan. Secara tidak sadar, mereka dikejar-kejar oleh sumpah tersebut (Gie, 2005: 334).

Rapat raksasa Ikada memberikan kesempatan kepada massa rakyat khususnya di Ibu Kota untuk ikut andil dalam jalannya proklamasi kemerdekaan. Meskipun kekuasaan Jepang menampilkan barisan tentara, tank-tank dan persenjataannya untuk mencegah kekacauan-kekacauan, kehadiran mereka dianggap oleh peserta demonstrasi dalam rapat raksasa Ikada sebagai sikap perlawanan. Rapat raksasa Ikada telah meningkatkan rasa percaya diri dan harapan yang semakin besar terhadap perjuangan kemerdekaan. Setelah rapat besar Ikada pada 19 September, keesokan harinya pagi-pagi hari sekali tentara Jepang mengepung Asrama Menteng 31 dan melakukan penangkapan terhadap sejumlah aktivis pemuda seperti Aidit, Lukman, A. M. Hanafi, Manaf Roni, Sidik Kertapati dan lainnya. Mereka diangkut menuju markas besar kempetai di Gambir Barat kemudian dibawa untuk ditahan di penjara Bukit Duri, Jatinegara. Hanya dalam waktu beberapa hari saja, atas bantuan kepala penjara Teuku H. Moh. Thajeb para pemuda berhasil melarikan diri (Sidik Kertapati, 1961: 119).

Pada akhir September 1945, tentara Inggris yang mewakili sekutu beserta tentara Belanda mendarat di Indonesia. Pada 29 September di sekitar Stasiun Senen terjadi pertempuran, orang-orang Cina yang dipersenjatai Belanda menembaki para pemuda dan rakyat yang coba mempertahankan kemerdekaan. Pada malam tanggal 5



Oktober sejumlah aktivis API Jakarta memutuskan untuk melakukan penyerangan terhadap tentara Belanda. Alizhar Thaib berperan sebagai komandan pasukan yang memegang komando serangan tersebut. Meskipun jabatan Aidit sebagai ketua API Jakarta, Alizhar Thaib memintanya untuk tidak ikut dalam operasi penyerangan. Sebab menurut pengalaman Alizhar Thaib, dimana ketika Aidit ikut operasi, ada saja kejadian yang merugikan. Tetapi Aidit bersikeras dan akhirnya ikut juga. Perlawanan gagal karena para pemuda dikepung oleh lima truk patroli tentara Inggris. Tiga puluh orang ditangkap termasuk Aidit, Alizhar Thaib dan Hazmin Syarif ditahan di penjara Glodok. Kemudian mereka diserahkan kepada tentara Belanda dan ditahan di pulau Onrust. Di pulau ini sudah ada kurang lebih 700 pemuda yang ditahan Belanda termasuk Gatot Mangkupradja, dan orang-orang Jerman yang ditahan selama masa perang karena menjadi sekutu Jepang. Setelah beberapa bulan berada di Onrust, para pemuda merencanakan pemberontakan untuk meloloskan diri. Usaha tersebut gagal dan para pemuda baru dibebaskan setelah ada pertukaran tahanan karena perundingan Linggarjati akan diadakan (Alizhar Thaib, 1993: 105).

KESIMPULAN

Aktivisme gerakan politik pemuda 1945 berkuat pada pengorganisiran, membaca, menulis dan diskusi. Hal ini adalah tuntutan atas realitas pada waktu itu yang sebagian besar pemuda gagal melanjutkan sekolah karena pendudukan Jepang menutup hampir sebagian besar sekolah di kota-kota besar seperti, Jakarta. Pemuda belajar politik tidak di dalam kelas, tetapi melalui pengalaman praktis dan dibimbing oleh mentor-mentor yang lebih dulu terjun di dalam aktivisme. Sumber inspirasi gerakan politik pemuda pada waktu itu adalah kelaparan dan kemiskinan rakyat Indonesia, sehingga ide



percepatan proklamasi kemerdekaan merupakan sesuatu yang sah untuk dilakukan. Pemuda “sebagai pencari kegelisahan” pada generasi 1945 menemukan aksi-aksi politiknya dalam aktivitas yang revolusioner tetapi dilakukan penuh kehati-hatian. Mereka tidak terbatas pada pengumpulan massa saja, tetapi melakukan pendidikan politik melalui penyelenggaraan diskusi dan mural yang dilakukan di fasilitas-fasilitas publik pada waktu itu. Sehingga Jakarta menjadi titik tolak persebaran informasi mengenai kemerdekaan yang tidak hanya sebatas momentum, tetapi dalam simbol aktivisme pemuda.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict. (1988). *Revoloesi Pemuda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Bintang Merah, (1953) No. 9.
- Gie, Soe Hok. (2005). *Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Kahin, George McTurnan. (2013). *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
- Kertapati, Sidik. (1961). *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Jakarta: Yayasan Pembaharuan.
- Martha, Ahmaddani G. dan Tim. (1985). *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Kurnia Esa.
- Poeze, Harry. (1999). *Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik*. Jakarta: Grafiti.
- Reid, Anthony. (2018). *Indonesia, Revolusi dan Sejumlah Isu Penting*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Soemarsono. (2008). *Revolusi Agustus: Kesaksian Seorang Pelaku Sejarah*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Thaib, Alizar. (1993). *19 September dan Angkatan Pemuda Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pancuran Mas.
- Wardaya, Baskara T. (Editor). (1999). *Mencari Demokrasi*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Widjojo, Muridan S. dan Tim. (1999). *Penakluk Rezim Orde Baru Gerakan Mahasiswa 98*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.